

**PENGARUH TRANSPARANSI, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN,
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI
EMPIRIS PADA DESA DI KECAMATAN TELUK MENGKUDU)**

Inez Bitu Nurisky¹, La Ane²

Universitas Negeri Medan

Email: inezbirsky@gmail.com¹, laane@unimed.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data diperoleh dari kuesioner yang disebarakan kepada aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Teluk Mengkudu, dengan jumlah responden sebanyak 70 orang yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, baik secara parsial maupun simultan. Nilai Adjusted R Square menunjukkan bahwa ketiga variabel independen mampu menjelaskan 69,5% variasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi, kualitas penyajian laporan keuangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal merupakan faktor penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Transparansi, Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis, karena mencerminkan kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Akuntabilitas yang lemah berpotensi menimbulkan inefisiensi, penyimpangan anggaran, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah (Romzek & Dubnick, 1987; Bovens, 2007). Dalam konteks pemerintahan desa, akuntabilitas menjadi semakin krusial seiring dengan meningkatnya kewenangan dan tanggung jawab desa dalam mengelola keuangan public secara mandiri.

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi yang luas kepada desa untuk mengelola pemerintahan dan keuangan secara mandiri. Kebijakan ini diperkuat dengan peningkatan alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN, yang pada periode 2015–2024 mencapai Rp609,9 triliun dengan alokasi tahun 2024 sebesar Rp71 triliun untuk 75.259 desa di Indonesia (DJP, 2025). Besarnya dana yang dikelola desa menuntut adanya tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Namun, peningkatan alokasi Dana Desa belum sepenuhnya diimbangi dengan penguatan tata kelola dan pengendalian internal yang memadai. Badan Pemeriksa Keuangan (2022), mengungkapkan masih lemahnya sistem pengendalian dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa. Indonesia Corruption Watch (2024) mencatat bahwa sektor pemerintahan desa menjadi penyumbang kasus korupsi tertinggi pada tahun 2023 dengan 187 kasus dan kerugian negara mencapai Rp162,2 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa masih menghadapi tantangan serius.

Kerangka hukum pengelolaan keuangan desa sebenarnya telah memberikan pedoman yang jelas. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip tersebut dirancang untuk menutup celah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Namun, implementasi ketentuan tersebut di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kelemahan yang terutama berkaitan dengan aspek transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal sebagai pilar utama akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berbagai kasus empiris menunjukkan bahwa lemahnya transparansi dan kualitas pelaporan keuangan desa masih menjadi persoalan nyata. Di Desa Pangguruan, Kabupaten Dairi, tidak dipasangnya spanduk infografis APBDes dan plang proyek tahun 2024 menyebabkan masyarakat kehilangan akses informasi terkait penggunaan Dana Desa (Sirait, 2024). Kasus serupa terjadi di Desa Tonjong, Kabupaten Bogor, di mana dugaan korupsi sebesar Rp500 juta muncul akibat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan realisasi kegiatan (Simangunsong, 2023). Permasalahan tersebut diperparah oleh lemahnya sistem pengendalian internal desa. KPK (2023) mencatat 851 kasus korupsi Dana Desa sejak tahun 2015, yang sebagian besar dipicu oleh lemahnya kontrol dan pengawasan internal, salah satunya di Kota Padang Sidempuan melalui pemalsuan dokumen APBDes untuk mencairkan Dana Desa sebesar Rp249 juta (Rahyuni, 2025).

Rangkaian kasus tersebut menegaskan bahwa transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal merupakan tiga komponen yang saling terkait dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal yang efektif menjamin keandalan pencatatan dan pelaporan keuangan, laporan keuangan yang berkualitas menjadi dasar transparansi yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara transparansi membuka ruang bagi pengawasan publik. Prinsip good governance menuntut ketiga aspek tersebut berfungsi secara simultan, karena kelemahan pada salah satu unsur

akan berdampak langsung pada menurunnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun, kajian empiris yang menguji ketiga variabel tersebut secara simultan masih terbatas. Sebagian penelitian terdahulu cenderung mengkaji transparansi atau pelaporan keuangan secara parsial (Kusrawan & Haris, 2022; Sya'diah et al., 2022). Padahal, Somad et al. (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas hanya dapat diperkuat apabila transparansi, kualitas pelaporan, dan sistem pengendalian internal berjalan terpadu. Selain itu, perbedaan konteks wilayah dan kapasitas kelembagaan desa menyebabkan variasi hasil penelitian, sebagaimana ditunjukkan oleh Fitri dan Arza (2023) yang menemukan tidak signifikannya pengaruh transparansi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas di Kota Pariaman.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengisi celah penelitian dengan menguji secara simultan pengaruh transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam konteks wilayah yang memiliki karakteristik dan permasalahan empiris yang spesifik.

Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, dipilih sebagai lokasi penelitian karena menunjukkan fenomena empiris yang relevan. Di Desa Pematang Kuala, dana modal BUMDes sebesar Rp150 juta tidak dipertanggungjawabkan secara transparan (Raja, 2023). Di Desa Pasar Baru, terjadi dugaan pemalsuan dokumen perubahan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Muhlis, 2024), sementara di Desa Sentang ditemukan dugaan penggelembungan harga pengadaan bibit ikan lele senilai Rp25 juta (Ningtyas, 2023). Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal belum berjalan efektif dan berdampak pada lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dengan karakteristik geografis sebagai wilayah pesisir, potensi pertanian yang signifikan, serta keberagaman kondisi sosial-ekonomi desa, Kecamatan Teluk Mengkudu menghadirkan dinamika pengelolaan keuangan desa yang kompleks dan menuntut tata kelola yang akuntabel. Pada tahun 2024, total alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Serdang Bedagai mencapai Rp203,6 miliar dengan tingkat realisasi sebesar 96,62% (Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara, 2024). Dalam konteks besarnya dana dan kompleksitas pengelolaan tersebut, setiap kelemahan dalam transparansi, penyajian laporan keuangan, maupun sistem pengendalian internal berpotensi menurunkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta menggerus kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman empiris mengenai pengaruh transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada desa-desa di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai.

KAJIAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak pemberi mandat (principal) dan pihak pelohnerima mandat (agent) dalam pengelolaan sumber daya (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks sektor publik, hubungan keagenan terjadi antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah desa sebagai agent yang diberi kewenangan untuk mengelola keuangan desa (Polutu et al., 2022). Hubungan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat asimetri informasi, di mana pemerintah desa memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan masyarakat. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya penyimpangan, sehingga diperlukan mekanisme pengendalian berupa transparansi, penyajian laporan keuangan yang berkualitas, serta sistem pengendalian internal untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tetap terjaga (Indraswari & Rahayu, 2021).

Teori Stewardship

Teori Stewardship memandang aparaturnya pengelola organisasi sebagai pihak yang cenderung bertindak selaras dengan tujuan organisasi dan kepentingan publik, bukan semata-mata didorong oleh kepentingan pribadi (Donaldson & Davis, 1991). Dalam konteks pemerintahan desa, teori ini memandang pemerintah desa sebagai pelayan masyarakat yang bertanggung jawab mengelola keuangan publik secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Penerapan transparansi, penyajian laporan keuangan yang berkualitas, serta sistem pengendalian internal dipahami sebagai instrumen pendukung kinerja dan akuntabilitas, bukan sekadar mekanisme pengawasan. Dengan demikian, Teori Stewardship memberikan landasan konseptual bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat terwujud apabila aparaturnya desa menjalankan perannya sebagai steward yang bertanggungjawab terhadap kepercayaan publik.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan keuangan secara terbuka dan sesuai ketentuan yang berlaku (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan administratif, tetapi juga mencerminkan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Dalam penelitian ini, akuntabilitas dipahami sebagai kemampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan, patuh terhadap regulasi, serta terbuka terhadap evaluasi dan pengawasan publik.

Transparansi

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Dalam pengelolaan keuangan desa, transparansi berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai perencanaan, realisasi, dan pertanggungjawaban anggaran memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan secara efektif, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Baihaqi et al., 2023). Dalam penelitian ini, transparansi dipandang sebagai sarana utama untuk memperkuat kepercayaan publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan adalah proses penyampaian informasi keuangan yang disusun secara sistematis, andal, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik (Mahsun, 2006). Laporan keuangan desa yang disajikan secara akurat dan tepat waktu memungkinkan pemangku kepentingan menilai kinerja serta penggunaan dana desa secara objektif. Dengan demikian, kualitas penyajian laporan keuangan menjadi faktor penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena menyediakan dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Rahmawati et al., 2023).

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, khususnya keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi (PP No. 60 Tahun 2008). Dalam konteks pemerintahan desa, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan pendeteksian penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif mampu membatasi peluang terjadinya kecurangan serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Polutu et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei yang bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner tertutup kepada responden.

Populasi penelitian adalah aparatur desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu aparatur yang secara langsung berperan dalam siklus pengelolaan keuangan desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan dan Pemerintahan, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kuesioner dibagikan secara langsung oleh peneliti kepada responden untuk memastikan tingkat respons dan kelengkapan data. Responden dipilih dengan mempertimbangkan keaktifan jabatan, keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, serta pengalaman kerja minimal satu tahun. Jumlah responden yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 70 orang. Pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti untuk memastikan tingkat respons serta kelengkapan data.

Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan statistik kuantitatif dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 25. Teknik analisis yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda serta koefisien determinasi (R^2). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, baik secara parsial maupun simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi	70	37	50	44.19	3.994
Akuntabilitas	70	47	60	54.06	3.952
Penyajian Laporan Keuangan	70	56	70	62.39	4.635
Sistem Pengendalian Internal	70	64	85	75.74	5.730
Valid N (listwise)	70				

Sumber: Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 1, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata (mean) variabel transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berada pada kategori tinggi, yang mengindikasikan bahwa responden menilai praktik pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan cukup baik. Sementara itu, nilai standar deviasi yang relatif lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen.

Uji Kualitas Data

Validitas

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan	Y1	0,733	0,235	Valid
	Y2	0,685	0,235	Valid

Variabel	Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
Keuangan Desa (Y)	Y3	0,473	0,235	Valid
	Y4	0,630	0,235	Valid
	Y5	0,568	0,235	Valid
	Y6	0,638	0,235	Valid
	Y7	0,664	0,235	Valid
	Y8	0,664	0,235	Valid
	Y9	0,523	0,235	Valid
	Y10	0,604	0,235	Valid
	Y11	0,444	0,235	Valid
	Y12	0,404	0,235	Valid
Transparansi (X1)	X1.1	0,739	0,235	Valid
	X1.2	0,786	0,235	Valid
	X1.3	0,690	0,235	Valid
	X1.4	0,506	0,235	Valid
	X1.5	0,685	0,235	Valid
	X1.6	0,669	0,235	Valid
	X1.7	0,703	0,235	Valid
	X1.8	0,565	0,235	Valid
	X1.9	0,586	0,235	Valid
	X1.10	0,559	0,235	Valid
Penyajian Laporan Keuangan (X2)	X2.1	0,673	0,235	Valid
	X2.2	0,788	0,235	Valid
	X2.3	0,705	0,235	Valid
	X2.4	0,684	0,235	Valid
	X2.5	0,727	0,235	Valid
	X2.6	0,782	0,235	Valid
	X2.7	0,750	0,235	Valid
	X2.8	0,523	0,235	Valid
	X2.9	0,595	0,235	Valid
	X2.10	0,602	0,235	Valid
	X2.11	0,452	0,235	Valid
	X2.12	0,404	0,235	Valid
	X2.13	0,374	0,235	Valid
	X2.14	0,383	0,235	Valid
Sistem Pengendalian Internal (Y3)	X3.1	0,507	0,235	Valid
	X3.2	0,639	0,235	Valid
	X3.3	0,576	0,235	Valid
	X3.4	0,719	0,235	Valid
	X3.5	0,658	0,235	Valid
	X3.6	0,663	0,235	Valid
	X3.7	0,727	0,235	Valid
	X3.8	0,647	0,235	Valid
	X3.9	0,646	0,235	Valid
	X3.10	0,630	0,235	Valid
	X3.11	0,557	0,235	Valid
	X3.12	0,532	0,235	Valid
	X3.13	0,649	0,235	Valid

Variabel	Butir Pernyataan	R hitung	R tabel	Keterangan
	X3.14	0,668	0,235	Valid
	X3.15	0,511	0,235	Valid
	X3.16	0,439	0,235	Valid
	X3.17	0,452	0,235	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 2, seluruh butir pernyataan menunjukkan nilai r hitung lebih besar daripada r tabel sebesar 0,235. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua item pada keseluruhan variabel penelitian dinyatakan valid. Artinya, seluruh butir pernyataan yang disebarkan kepada responden telah memenuhi kriteria kelayakan dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	12	0,819	0,70	Reliabel
Transparansi (X1)	10	0,818	0,70	Reliabel
Penyajian Laporan Keuangan (X2)	14	0,852	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X3)	17	0,885	0,70	Reliabel

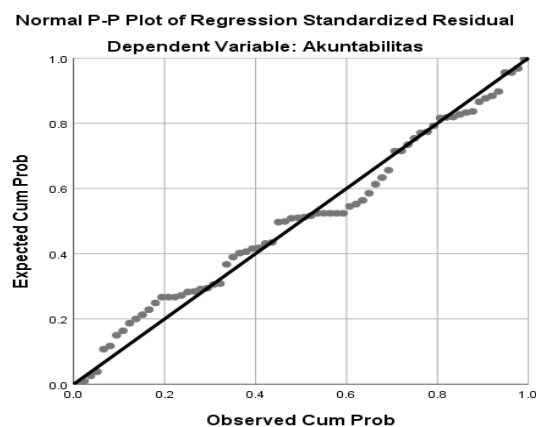
Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 3, seluruh variabel menunjukkan nilai Cronbach Alpha yang melebihi batas minimum 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan sudah menunjukkan tingkat keterandalan yang baik. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dapat dinyatakan reliabel, sehingga layak untuk digunakan dalam proses analisis data selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

a. Hasil Uji Normalitas Pendekatan Grafik Normal Probability Plot



Gambar 1 Grafik Normality P-Plot

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan gambar 1, terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Pola ini menunjukkan bahwa sebaran residual tidak menyimpang secara signifikan dari distribusi normal yang diharapkan. Dengan demikian, hasil P-P Plot mengindikasikan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov

Tabel 4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		70
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.13631348
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.077
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan Tabel 4, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2 tailed) sebesar 0,200. Nilai tersebut > 0,05, sehingga menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi uji normalitas.

Uji Heteroskedestisitas

Tabel 5 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.001	.000		-1.380	.172
	Transparansi	.128	.065	.461	1.951	.055
	Penyajian Laporan Keuangan	.067	.068	.298	.980	.331
	Sistem Pengendalian Internal	-.067	.058	-.245	-1.143	.257
a. Dependent Variable: ABS_RES						

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 5, seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi (Sig.) yang lebih besar dari 0,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah heteroskedastisitas dan memenuhi syarat uji asumsi klasik.

Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Transparansi	.383	2.609
	Penyajian Laporan Keuangan	.262	3.813
	Sistem Pengendalian Internal	.417	2.396
a. Dependent Variable: Akuntabilitas			

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 6, seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kuat

antarvariabel bebas dalam model. Dengan demikian, model regresi pada penelitian ini dinyatakan terbebas dari multikolinearitas dan memenuhi syarat uji asumsi klasik.

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.320	3.750		1.952	.055
	Transparansi	.249	.106	.252	2.340	.022
	Penyajian Laporan Keuangan	.283	.111	.332	2.554	.013
	Sistem Pengendalian Internal	.239	.071	.346	3.363	.001
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 7, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 7.320 + 0.249X_1 + 0.283X_2 + 0.239X_3 + e$$

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa variabel transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal memiliki koefisien regresi bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada masing-masing variabel independen cenderung diikuti oleh peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Uji Hipotesis

Uji parsial (t)

Tabel 8 Hasil Uji parsial (t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.320	3.750		1.952	.055
	Transparansi	.249	.106	.252	2.340	.022
	Penyajian Laporan Keuangan	.283	.111	.332	2.554	.013
	Sistem Pengendalian Internal	.239	.071	.346	3.363	.001
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

a. Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel transparansi memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga Transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, dengan demikian, H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.

Uji Simultan (F)

Tabel 9 Hasil Uji simultan (F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	762.867	3	254.289	53.296	.000 ^b
	Residual	314.905	66	4.771		
	Total	1077.771	69			
a. Dependent Variable: Akuntabilitas						
b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Penyajian Laporan Keuangan						

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 9, diketahui bahwa nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$. Sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji F, kondisi tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Transparansi (X1), Penyajian Laporan Keuangan (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y).

Uji Determinasi

Tabel 10 Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.841 ^a	.708	.695	2.184
a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Transparansi, Penyajian Laporan Keuangan				
b. Dependent Variable: Akuntabilitas				

Sumber: Data primer yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel 10, nilai Adjusted R Square sebesar 0,695. Artinya, Transparansi, Penyajian Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal mampu menjelaskan 69,5% variasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Sisanya 30,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,022 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,340 > t_{tabel}$ 1,995. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi keuangan, maka semakin kuat pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Secara substantif, transparansi berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara aparatur desa sebagai pengelola dana dan masyarakat sebagai pemberi mandat, sehingga pengawasan publik dapat berjalan lebih efektif dan mendorong pengelolaan keuangan yang tertib serta sesuai ketentuan. Transparansi sebagai prinsip good governance memungkinkan

proses pertanggungjawaban pemerintah desa dinilai secara objektif, meminimalkan potensi penyimpangan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Temuan ini konsisten dengan penelitian Kusrawan dan Haris (2022) serta Somad et al. (2023) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan desa tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan publik yang efektif dalam mendorong aparatur desa mengelola keuangan secara bertanggung jawab.

Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $2,554 > t_{tabel}$ 1,995. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas penyajian laporan keuangan yang disusun secara relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami, maka semakin meningkat pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Secara substantif, penyajian laporan keuangan yang berkualitas menyediakan informasi yang relevan dan andal sebagai dasar pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan desa, sehingga mendorong pertanggungjawaban yang lebih tertib dan sesuai ketentuan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sabriani (2020) dan Sya'diah et al. (2022) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun secara akurat dan sistematis tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan dan evaluasi yang memperkuat pertanggungjawaban pemerintah desa atas penggunaan dana publik.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ dan nilai t_{hitung} sebesar $3,363 > t_{tabel}$ 1,995. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang memadai merupakan faktor penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Secara substantif, sistem pengendalian internal berperan dalam memastikan bahwa setiap tahapan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan sesuai prosedur, meminimalkan risiko kesalahan dan penyimpangan, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal. Sistem pengendalian internal yang efektif mendorong aparatur desa bekerja secara disiplin, taat aturan, dan bertanggung jawab. Temuan ini konsisten dengan penelitian Sabriani dan Rahayu (2020), yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang terstruktur dan dapat diukur melalui prosedur, pemisahan fungsi, serta mekanisme pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan internal yang memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan, meminimalkan risiko penyimpangan, serta memperkuat pertanggungjawaban aparatur desa atas penggunaan dana publik.

Pengaruh Transparansi, Penyajian Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan nilai F_{hitung} sebesar 53,296 > F_{tabel} 2,74 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa tidak dibentuk oleh satu faktor secara terpisah, melainkan oleh keterpaduan berbagai unsur tata kelola keuangan.

Secara konseptual, transparansi berfungsi membuka akses informasi keuangan kepada publik, penyajian laporan keuangan memastikan informasi yang disampaikan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara sistem pengendalian internal menjamin proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur dan regulasi. Kombinasi ketiga variabel tersebut menciptakan mekanisme pengelolaan keuangan desa yang saling melengkapi dan memperkuat akuntabilitas. Temuan ini mendukung prinsip good governance dan teori stewardship yang memandang aparatur desa sebagai pengelola amanah publik yang memerlukan sistem tata kelola yang terintegrasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Sabriani dan Rahayu (2020) serta Sya'diah et al. (2022) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terbentuk melalui sinergi antara transparansi, kualitas pelaporan keuangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pengaruh Transparansi, Penyajian Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Teluk Mengkudu maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, (2) Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, (3) Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, (4) Secara simultan, transparansi, penyajian laporan keuangan, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa memerlukan penerapan tata kelola keuangan yang transparan, penyajian laporan keuangan yang berkualitas, serta sistem pengendalian internal yang efektif dan terintegrasi.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena data yang digunakan hanya bersumber dari persepsi responden melalui kuesioner, sehingga belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi faktual pengelolaan keuangan desa secara administratif dan teknis. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel lain seperti komitmen organisasi, pengawasan eksternal, dan kompetensi aparatur, serta menggunakan pendekatan kualitatif atau metode campuran agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. R., Suryadi, I., & Andayani, R. (2024). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Batujajar). *Jurnal Riset dan Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 11–22. <https://doi.org/10.30596/jraa.v7i1.13645>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022. Jakarta: BPK RI. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-reveals-9158-audit-findings-of-rp1837-trillion-in-1st-semester-of-2022>
- Baihaqi, A. M., Hidayat, T., & Sutrisno, S. (2023). The village financial management through accountability, transparency and community participation. *Jurnal Perspektif Akuntansi*, 6(2), 51–61. <https://ejournal.uksw.edu/persi/article/view/7046>
- Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). *The Modern Corporation and Private Property*. New York: Macmillan.

- Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. (2024). Laporan realisasi dana desa tahun anggaran 2024. Medan: Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-detail3-2023-Y0dabIN0eWpJMDUzcUNLY3BSdkNoZz09?utm>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–4468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Total Dana Desa 2015–2024. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/balickpapan/id/data-publikasi/artikel/3055-10-tahun-dana-desa.html>.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49-64.
- Fitri, R. A., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh transparansi, sistem pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan nagari: Studi Empiris pada Nagari di Kota Pariaman. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(3), 1115-1126. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/index>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 (edisi 9). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indonesia Corruption Watch. (2024). Narasi laporan hasil pemantauan tren korupsi tahun 2023. Jakarta: ICW.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa , Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4), 1–15.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Komisi Pemberantasan Korupsi. Anti-Corruption Learning Center. (2023). Menebar benih antikorupsi di desa-desa. Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231027-menebar-benih-antikorupsi-di-desa-desa>
- Kusrawan, T., Liswatin, & Haris, T. S. (2022). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Barowila. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, 24(1), 12–24.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Muhlis. (2024). Mantan sekdes di Serdang Bedagai terjerat kasus dugaan pemalsuan tanda tangan. JPNN.com. <https://sumut.jpnn.com/sumut-terkini/5264/polres-sergai-amankan-mantan-sekdes-yang-diduga-palsukan-tanda-tangan-anggaran-desa?utm>.
- Munawaroh, M. (2023). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Jambi
- Ningtyas. A. K. (2023). Dugaan Penggelembungan Anggaran Dana Desa Pengadaan Bibit Ikan Lele di Serdang Bedagai. <https://www.realitasonline.id/kriminal/102410085908/dugaan-penggelembungan-anggaran-dana-desa-pengadaan-bibit-ikan-lele-di-serdang-bedagai>
- Pembangunan Provinsi Sumatera Utara. (2024). Realisasi Dana Desa Kabupaten/Kota Tahun 2024. <https://prp2sumut.sumutprov.go.id/kabupaten-kota-detail3-2024-Y0dabIN0eWpJMDUzcUNLY3BSdkNoZz09>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Polutu. A., Mattoasi, Usman, (2022), Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, *Jambura Accounting Review*, 3(2), 66-78, <http://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar>
- Rahmawati, D., Dirgantari, N., Fakhruddin, I. & Winarni, D. (2023). Faktor determinasi kualitas laporan keuangan pemerintah desa di Kecamatan Gandrungmangu. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 6(2), 213–225. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v6i2.1166>
- Rahyuni, F. (2025, 5 Juni). Modus Eks Kades di Sidimpuan Korupsi Rp 249 Juta, Palsukan Tanda Tangan Warga. *DetikSumut*. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7949455/modus-eks-kades-di-sidimpuan-korupsi-rp-249-juta-palsukan-tanda-tangan-warga>
- Raja. (2023). Keberadaan Dana BUMDes Pematang Kuala Dipertanyakan. *Delitimes.id*. <https://delitimes.id/keberadaan-dana-bumdes-pematang-kuala-dipertanyakan/?utm>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38675/uu-no-6-tahun-2014>
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. *Public Administration Review*, 47(3), 227–238. <https://doi.org/10.2307/975901>
- Sabriani, A. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2019). *Jurnal Akuntansi & Ekonomi Fe. Un Pgri Kediri*, 5(2),
- Simangunsong, W, S. (2023). Polisi temukan kejanggalan di laporan keuangan eks kades Tonjong Bogor, ternyata korupsi Rp 500 juta. *Kompas.com*. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/10/12/13363971/polisi-temukan-kejanggalan-di-laporan-keuangan-eks-kades-tonjong-bogor>
- Sirait, E. (2024, 11 Juni). Diduga Dana Desa Pangguruan Tidak Transparan, Spanduk Infografis APBDes dan Plang Proyek Tahun 2024 Tidak Terpasang. *Liputan4.com*. <https://liputan4.com/diduga-dana-desa-pangguruan-tidak-transparanspanduk-informasi-apbdes-dan-plang-proyek-tahun-2024-tidak-terpasang/>
- Somad, F. H., Naz'aina, N., Khaddafi, M., & Razif, R. (2023). Pengaruh penyajian, aksebilitas, dan transparansi laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD pada Pemerintah Kota Lhokseumawe. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)*, 2(2), 95–108. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11866>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sya'diah, H., Sissah, & Hafiz, A. P. (2022). Pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas informasi desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi*, 2(2), <https://journal.sinov.id/index.php>.